

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memelihara sapi sangat menguntungkan masyarakat, selain produksi daging, susu dan sebagai tenaga kerja, juga diharapkan mempunyai keturunan atau dapat mengembangbiakan. Peternakan sapi perah sebagai sumber air susu utama perlu dibina dan dikembangkan kearah yang lebih intensif dan terpadu, sehingga populasi ternak sapi perah meningkat dan proyeksi konsumsi protein asal hewani menjadi naik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus meningkatkan produksi ternak khususnya sapi perah. Dalam mengembangbiakan sapi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan perkawinan secara alami dan secara suntik (Inseminasi Buatan). (Abbas Siregar, 1996:30)

Perkawinan secara alami ini, seekor pejantan akan memancarkan sperma secara langsung ke dalam alat reproduksi betina dari pejantan itu sendiri. Dalam hal ini sejumlah sperma ditumpahkan kedalam alat reproduksi betina. Perkawinan sebaiknya dilakukan pada suatu tempat atau kandang khusus untuk mengawinkan sapi tersebut. Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi yang dipakai dalam program pengembangbiakan ternak (hewan) dengan memanfaatkan bibit pejantan unggul secara maksimal dan higienis untuk meningkatkan produktivitas. (Toelihere, 2006:17)

Teknologi IB pertama dikembangkan oleh Spallazani dari Italia pada anjing (1780) dan kuda (1803), dilanjutkan oleh Sand dan Stribolt dari Denmark tahun 1920, dan pada sapi oleh Ivanoff dari Rusia tahun 1912. Di Indonesia,

teknologi IB diperkenalkan pertama kali oleh Prof. B. Seit dari Denmark pada tahun 1953. Namun penerapan secara meluas tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan program yang tidak konsekuen telah menyebabkan lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan selama dua puluh tahun sejarah perkembangan di negeri ini. (Toelihere, 2006:18)

Perkawinan buatan yang juga dikenal dengan AI (*Artificial Insemination*) ialah suatu cara dimana sperma dikumpulkan dari pejantan atau dirawat (dalam kondisi tertentu di luar tubuh hewan). Kemudian dibantu dengan alat semen atau sperma tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin betina. Jadi proses perkawinan buatan ini meliputi mengumpulkan sperma (semen), perawatan semen, kemudian semen tersebut dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina. (Aksi Agraris Kanisius, 1993:84) Jadi menurut definisi, bahwa inseminasi buatan adalah pemasukan atau penyampaian semen beku kedalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia, jadi bukan secara alami.

Inseminasi buatan adalah proses pemasukan *spermatozoid* hewan jantan kedalam tubuh hewan betina yang dilakukan dengan bantuan alat tertentu. Oleh karena itu inseminasi buatan sering disebut dengan kawin suntik, rekayasa reproduksi inseminasi sering dilakukan pada hewan ternak sapi atau lembu. ([Http://anak.cinema /inseminasi buatan.com](http://anak.cinema/inseminasi_buatan.com))

Adapun tujuan inseminasi buatan pada sapi yaitu:

1. Memperbaiki mutu genetik ternak.
2. Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya.

3. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama.
4. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur.
5. Mencegah penularan/penyebaran penyakit kelamin. (M.Rizal Herdis, 2008:1)

Jadi, inseminasi buatan pada hewan dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, yaitu inseminasi buatan pada hewan khususnya sapi dapat memperbaiki ternak, serta meningkatkan mutu ternak. Dengan meningkatnya mutu sapi tersebut masyarakat atau peternak sapi mendapat hasil yang lebih baik, karena dengan sapi yang bermutu tinggi dapat meningkatkan hasil yang banyak, dipasaran pun pasti yang dipilih adalah sapi dari jenis yang unggul atau yang terbaik.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah yang kontemporer karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik didalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih klasikpun. Sedangkan dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual dan membeli sperma hewan jantan tersebut dilarang menurut hukum Islam. Seperti hadits di bawah ini: (Ibnu Hajar, 2001:452)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ
الْفَخْلِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra berkata, Rasulullah melarang sperma pejantan." (HR.

Bukhari, no.2284)

Ibnu Hajar mengatakan, “Apapun maknanya, memperjual belikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahkan terimakan. (*Fathul Bari*, jilid 6, hlm.60, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431H) Ibnu Qayyim mengatakan, “Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status ‘jual beli sperma’ ataupun ‘sewa pejantan’. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan.” (*Zadul Ma’ad*, juz 5, hlm.705, Muassasah Ar-Risalah, cetakan keempat, 1425H). Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang, yang pertama objek transaksi (sperma pejantan) tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan syahwat pejantan. Kedua, objek transaksi memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya. (*Zadul Ma’ad*, juz 5, hlm.705, Muassasah Ar-Risalah, cetakan keempat, 1425H). Alasan diatas sekarang sudah dipatahkan dengan teknologi suntik sapi atau inseminasi buatan, jadi sperma pejantan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian disimpan didalam tabung khusus, sperma terlihat jelas ukuran dan jumlahnya, sehingga sperma bisa diserahkan terimakan.

(<http://pengusahamuslim.com/2134-jual-beli-spermapejantan.html>)

Inseminasi buatan hanya boleh dilakukan oleh petugas dari Dinas Peternakan (inseminator), caranya peternak mengundang petugas inseminator dari

Dinas Peternakan untuk membuahi atau menyuntik sapi dengan inseminasi buatan. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan serta memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi Buatan (SIM-IB). Surat Izin Melakukan Inseminasi Buatan (SIM-IB) adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, pemegang SIM-IB berhak melakukan inseminasi buatan dan berlaku selama 4 (empat) tahun. (Petunjuk Teknis Lomba Petugas Inseminator Berprestasi Jawa Barat, 2014)

Peternak di desa Sukaluyu merupakan anggota dari sebuah koperasi yang ada di kecamatan Pangalengan, yaitu Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan). Atas prakarsa beberapa tokoh masyarakat yang disepakati oleh para peternak sapi perah, pada tanggal 1 April 1969 didirikan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan), dan telah resmi menjadi Badan hukum no. 4353/bh/pad/518-kop/v/2007, pada tanggal 28 mei 2007.

Pada pelaksanaannya, praktik inseminasi buatan yang dilakukan oleh peternak Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan pihak KPBS Pangalengan adalah pembayaran yang sudah diwajibkan. Adapun untuk tarif sperma sapi jantan biasa tidak ditarifkan, karena setiap bulannya para peternak diwajibkan membayar iuran sekitar 5% (lima persen) sebagai Dana Kesehatan Ternak (DKT). Dana tersebut dipotong dari pendapatan perbulannya peternak hasil dari menjual susu sapi kepada pihak KPBS Pangalengan. (Hasil

wawancara dengan staf KPBS Pangalengan Ibu Ina Tafta Uzayina tanggal 17 April 2017)

Selanjutnya, berdasarkan informasi dari Ibu Ina selaku Humas dan Sekretariat KPBS Pangalengan, pengambilan bibit pejantan dimulai dari Dinas BIB (Balai Inseminasi Buatan), semen beku tersebut diolah oleh Dinas BIB. Kemudian, KPBS Pangalengan pesan kepada BIB sejumlah dosis yang dibutuhkan, setelah BIB memberikan semen beku tersebut pihak KPBS Pangalengan membayar kepada BIB, selanjutnya KPBS Pangalengan memberikan bibit pejantan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan studi kasus diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Pembayaran Inseminasi Buatan pada Sapi antara Peternak dengan KPBS Pangalengan di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Peternak di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung mengembangkan ternaknya dengan cara inseminasi buatan. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah yang kontemporer karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik didalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dalam kajian fikih klasikpun. Sedangkan dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual dan membeli sperma hewan jantan tersebut dilarang menurut hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah

dipaparkan maka peneliti merumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik inseminasi buatan pada sapi di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan inseminasi buatan pada sapi di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori seputar permasalahan akad pembayaran inseminasi buatan pada hewan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian yang memiliki relevansi

mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek pembayaran inseminasi buatan pada sapi.

2. Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber ilmu pengetahuan bagi siapa yang membacanya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran tertulis demi terciptanya pengetahuan dan wawasan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep dan Teori

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad”. Dalam hukum Islam, kata akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Didalam pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek. (Syamsul Anwar, 2007:68)

Akad menurut bahasa ‘*Akad*’ mempunyai beberapa arti, antara lain:

Mengikat (الرَبْطُ), yaitu:

جَمْعُ طَرْفَى حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأُخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحُهَا كَقِطْعَةٍ
وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.” (Hendi Suhendi, 2008:44)

Yang kedua disebut sebagai sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَ يُوثِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.” (Hendi Suhendi, 2008:44)

Dan yang selanjutnya disebut sebagai janji (الْعَهْدُ) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 76, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa.” (Al-Qur’an, Al-Kalam Digital Versi 1.0, 2009:59)

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan fikih ulama adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara* yang berdampak pada objeknya. (Rachmat Syafe’i, 2001:44) Selanjutnya, rukun akad menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad mempunyai tiga rukun, yaitu: Orang yang berakad (*‘aqid*), sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*), dan *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*. (Rachmat Syafe’i, 2001:45)

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad: kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu diizinkan oleh *syara* dan janganlah akad itu yang dilarang oleh *syara*, akad dapat memberikan *faidah*

sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah, *ijab* itu berjalan terus. Maksudnya, *ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum akadnya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal. (Hendi Suhendi, 2008:50)

Macam-macam akad: *Pertama*, *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. *Kedua*, *Aqad Mualaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. *Ketiga*, *Aqad Muhdaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008:50)

Menurut Syamsul Anwar dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Muamalat*" bahwa asas-asas akad adalah sebagai berikut: (Syamsul Anwar, 2007:83-92) Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

Asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah. Asas konsensualisme, yaitu menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Asas janji itu mengikat, dalam kaidah ushul fikih, "perintah itu pada asasnya menunjukan wajib". Asas keseimbangan, hukum perjanjian Islam

tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

Asas kemaslahatan, dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak menimbulkan kerugian. Asas amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Asas keadilan, keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah dalam Al-Qur'an (QS. 5:8) dan keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yaitu Akad *Tabarru* dan akad *Tijari*. Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. sama sekali tidak ada unsur mencari *return*, ataupun suatu motif. Yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya adalah sebagai berikut: (<http://alapalapingintaubat.blogspot.com/p/jenis-jenis-akad-dalam-perbankan.html> diakses 26 Agustus 2015)

Pertama, hibah (pemberian). Menurut Ulama Hanabillah, *hibah* ialah memberikan kepemilikan atas barang yang dapat *ditasharufkan* berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya *uzur* untuk mengetahuinya, berwujud dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti yang dapat dikategorikan sebagai *hibah* menurut *adat* dengan *lafadz hibah* atau *tamlik* (menjadikan milik).

Kedua, wakalah adalah pemberian kuasa dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan, baik yang sifatnya urusan umum maupun urusan yang bersifat spesifik (tertentu), dimana pihak penerima kuasa biasanya mendapatkan imbalan berupa *fee*. (Abdul Ghofur Anshori, 2010:16)

Ketiga, kafalah adalah pihak yang bersedia mejadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak penanggung menerima imbalan dari tertanggung berupa *fee* atau komisi. (Abdul Ghofur Anshori, 2010:13)

Keempat, hiwalah adalah penanggungan hutang seseorang oleh pihak ketiga. *Kelima, rahn* adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan oleh seseorang dengan ketentuan bahwa dalam hal pihak yang meminjam itu *wanprestasi*, maka memberikan hak kepada pihak yang meminjamkan untuk menjual barang jaminan tersebut dan diambil sebesar hutang pokok yang ada. (Abdul Ghofur Anshori, 2010:15)

Keenam, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan. *Ketujuh, qard al-hasan* adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan yang miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang. (Abdul Ghofur Anshori, 2010:14)

Kedelapan, wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang

menerima titipan untuk mengembalikan sewaktu-waktu. (Abdul Ghofur Anshori, 2010:15)

Selanjutnya, akad *Tijari* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan *komersial (for profit oriented)*. Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mencari keuntungan. Yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya: (<http://alalapingintaubat.blogspot.com/p/jenis-jenis-akad-dalam-perbankan.html> diakses 26 Agustus 2015)

Pertama, murobahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Adiwarman A Karim, 2013: 113) *Kedua, mudhorobah* atau *qiradh* adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad. (Sulaiman Rasjid, 1994: 299) *Ketiga, ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Chairuman Pasaribu & Sahrawandi K.Lubis, 1993: 52) *Keempat, al-salam* adalah “jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka”, atau dengan bahasa lain “jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.” (Ghufron A. Mas’adi, 2002:143)

Kelima, al-istishna adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. (Ghufron A. Mas’adi, 2002:143) *Keenam, syirkah* yang menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah

ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. (Rachmat Syafe'I, 2001: 185) *Ketujuh, muzaro'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap). (Sulaiman Rasjid, 1994: 301) *Kedelapan, mukhobaroh* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. (Sulaiman Rasjid, 1994: 302)

Suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: (Adiwarman Karim, 2013:29-30)

Pertama, haram zatnya (*haram lidzatihhi*), transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah. *Kedua*, haram selain zatnya. Seperti melanggar prinsip "*An Taradin Minkum*" yang dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis*, dan dapat terjadi 4 (empat) hal, yakni *tadlis* dalam kuantitas (contohnya pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya), *tadlis* dalam kualitas (contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya), *tadlis* dalam harga (contohnya memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas

harga pasar), dan bentuk *tadlis* yang terakhir adalah *tadlis* dalam waktu penyerahan (contohnya petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal sipetani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya). Selanjutnya melanggar prinsip "*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*" yakni jangan mendzalimi dan jangan di dzalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya *gharar*, *ihtikar* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *riba*, *maysir* (perjudian), dan *risywah* (suap-menyuap).

Ketiga, tidak sah/lengkap akadnya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini: rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *taalluq* (ketika dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung akad 2), dan yang selanjutnya adalah terjadi "*two in one*" (kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan). (Adiwarman Karim, 2013:30-49)

Selanjutnya, dari sekian banyak akad yang sudah dijelaskan diatas sesuai dengan tujuan akadnya yaitu akad tabarru dan tijari maka dalam hal studi kasus yang terjadi di daerah Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung lebih cenderung terhadap akad upah-mengupah (*ijarah*), mengenai akad pembayaran inseminasi pada sapi yang dilakukan peternak dengan KPBS Pangalengan. Berikut sekilas penjelasan tentang akad *Ijarah*.

Ijarah adalah menjual manfaat atau juga upah dan sewa. Jasa atau imbalan ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ijarah* secara sederhana, diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti rumah dan lain-lain. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah. (Amir Syarifuddin, 2003:215-216)

Menurut Imam Hambali *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat atau imbalan. Menurut Imam Syafii *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Imam Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Adapun rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut: *Aqid* (orang yang menyewakan dan yang menyewa), syaratnya adalah orang yang berakal, dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa, keadaan keduanya tidak bersifat mubadzir dan sudah *baligh*/dewasa. (Moh Saifulloh Al Azis S, 2005:378) *Shigat Akad* (ijab dan kabul), objek akad yang disyaratkan keadaannya diketahui dalam beberapa hal yaitu jenisnya, kadarnya, sifatnya. *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh)

menurut *syara* bukan hal yang dilarang. (Hendi Suhendi, 2008:118) *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah*, bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Amir Syarifuddin, 2003:215-216)

Dasar hukum *ijarah*. Dalam Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Al-Qur'an, Al-Kalam Digital Versi 1.0, 2009:559)

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majjah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (Hendi Suhendi, 2008:116)

الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

Artinya: “Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.”

(<https://muhamadnorabdi.wordpress.com/category/makalah> diakses 21september)

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

Artinya: “Risiko itu menyertai manfaat.”

Upah sesungguhnya dari seorang buruh tergantung dari berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.

Inseminasi buatan adalah pembuahan yang dibantu oleh seorang Petugas Inseminasi Buatan. Sperma pejantan telah diolah sedemikian rupa dan dimasukkan ke alat suntik sehingga akan mempermudah proses pembuahan. Sperma pejantan juga diidentifikasi sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Dengan begitu peternak akan tahu dan paham sperma pejantan yang dimasukkan ke saluran rahim betina. Dengan cara inseminasi buatan maka petani akan lebih diuntungkan, yaitu proses pembibitan cepat dan hasilnya dapat diketahui dengan pasti. Dengan proses perkawinan seperti ini maka perkembangan produksi daging sapi akan meningkat dengan cepat. Sehingga kebutuhan daging sapi dan susu dalam negeri dapat dipenuhi oleh peternak lokal, yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan peternak Indonesia. (Toelihere, 2006:19) Dengan pemanfaatan perkembangan teknologi peternakan maka kualitas serta kapasitas produksi daging sapi dan susu di Indonesia tidak kalah dengan produk impor.

Produk impor yang sering membuat stabilitas harga produk lokal tidak laku dan merugikan peternak.

Seiring dengan perkembangan teknologi peternakan maka proses pembuahan hewan ternak dengan inseminasi buatan akan lebih jelas. Sperma pejantan sebagai objek yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas oleh pembeli. Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh: laporan peternak, pakan yang diberikan, petugas, kondisi ternak, bibit, dan lain-lain. Maka jika terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik antara peternak dan petugas inseminasi buatan proses pembuahan akan berhasil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai sumber, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Abdul Aris (2009), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembayaran Inseminasi Buatan pada Sapi antara Masyarakat dengan Dinas Peternakan di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang ada di Desa Gentinggunug, merupakan akad ijarah atau upah atas pekerjaan. Adapun proses pembayaran yang dilakukan, masyarakat Gentinggunung yaitu jika petugas sudah datang dan selesai melakukan inseminasi pada sapi tersebut mereka memberikan upah atau bayaran kepada Dinas Peternakan. Masyarakat Gentinggunung mengatakan tidak pernah membeli sperma

dan petugaspun tidak menjual sperma yang dibawa, tetapi sperma tersebut hanya alat untuk menyuntik. Jika petugas inseminator sudah selesai melakukan penyuntikan tersebut mereka diberikan bayaran. Jadi inseminasi buatan pada sapi di Desa Gentinggunug tersebut bukan jual beli sperma tetapi berupa upah yang diberikan kepada petugas inseminator yang telah melakukan pekerjaan dalam penyuntikan atau inseminasi buatan pada sapi.

Kedua, Ahmad Barozah (2010), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang". Setelah dilakukan penelitian, jual beli sperma hewan dalam proses IB yang terjadi di Desa Bigaran dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian yang disebabkan sulitnya mengawinkan ternak sapi secara alami. Dengan kemudahan serta unggulnya bibit yang dihasilkan dari proses IB maka peternak lebih mendapatkan manfaat dari jual beli sperma beku (*strow*). Jual beli sperma beku (*strow*) telah sesuai dengan kaidah fikih yaitu mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sperma beku telah diolah sedemikian rupa sehingga adanya kejelasan jaminan kepastian terhadap keberhasilan inseminasi, sperma beku telah sesuai dengan syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik jual beli sperma beku dalam inseminasi buatan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Ketiga, M. Sholahuddin Hendhi (2014), "Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan (*'Urf*) yang dipraktikkan oleh masyarakat Batealit bukanlah transaksi jual beli sperma, tetapi yang menjadi kebiasaan (*'Urf*)

masyarakat Batealit adalah membayar sejumlah uang atau upah (ijarah) kepada petugas inseminasi buatan yang telah melakukan pekerjaan dalam pembuahan pada hewan ternak yang dipelihara mereka. Masyarakatnya mengatakan bukan membeli sperma tetapi hanya memberikan sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan petugas inseminasi buatan (IB) dari Dinas Peternakan. Dalam Islam *ijarah* atau upah mengupah itu diperbolehkan.

Keempat, Yuyu Yusana (2014), *Praktek Jual Beli Sperma Kambing di Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya*. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa latar belakang adanya praktek jual beli sperma kambing ini yaitu adanya faktor kebutuhan yang mendesak, faktor kebiasaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan fikih muamalah jual beli sperma kambing di Desa Ciroyom hukumnya haram karena sperma merupakan objek jual beli yang masih samar dan tidak bisa diketahui kualitas dan kuantitasnya.

Kelima, M. Sahlan Marzuki (2016), “*Pelaksanaan Jasa Inseminasi Buatan pada Sapi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi yang ada di Desa Sukamantri merupakan akad *ijarah* atau upah atas pekerjaan, yang mana anggapan dari masyarakat bahwa pembayaran tersebut dimaksudkan untuk membeli sperma tetapi hanya memberikan sebuah upah atas pekerjaan yang diberikan kepada petugas yang telah membantu masyarakat dalam pembuahan/ perkawinan buatan pada sapi.

Tabel di bawah ini akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian kajian penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Aris (2009)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembayaran Inseminasi Buatan Pada Sapi Antara Masyarakat Dengan Dinas Peternakan Di Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal	Persamaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek formal yaitu sama-sama membahas mengenai akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada tempat dilakukannya penelitian dan akad yang digunakan.
2.	Ahmad Barozah (2010)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang	Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sperma binatang ternak.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada tempat dilakukannya penelitian.
3.	M.Sholah uddin Hendhi (2014)	Tinjauan <i>'Urf</i> tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)	Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sperma binatang ternak.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada sudut pandang penelitian yaitu <i>'Urf</i> .
4.	Yuyu Yusana (2014)	Praktek Jual Beli Sperma Kambing di Desa Ciroyom Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya	Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sperma binatang ternak.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada tempat dilakukannya penelitian.
5.	M. Sahlan Marzuki (2016)	Pelaksanaan Jasa Inseminasi Buatan pada Sapi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang	Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang praktek inseminasi buatan.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada akad yang digunakan.

Dari ketiga penelitian di atas, dalam penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa perbedaan:

- a. Objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dengan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS Pangalengan).
- b. Akad yang digunakan dalam praktek Inseminasi Buatan menggunakan akad *ijarah* (upah mengupah) antara peternak dengan KPBS Pangalengan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan *relevan* guna menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu melakukan proses pengumpulan data secara apa adanya dan memecahkan masalah yang ditemukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan jasa inseminasi buatan pada sapi. (Beni Ahmad Saebani, 2008:90)

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, buku-buku yang diambil diperoleh dan diteliti.

4. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah yang dipraktikkan di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

5. Teknik Penelitian

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2003: 60). Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu kegiatan mengadakan pengamatan secara teliti dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek inseminasi buatan pada sapi menurut hukum

ekonomi syariah yang dipraktikkan di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

- b. Wawancara (*Interview*), adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu dengan para pihak yang terkait dan dilakukan secara terbuka.
- c. Studi kepustakaan, yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat serta pihak dari dinas peternakan mengenai mekanisme dan akad pembayaran inseminasi buatan pada sapi.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari data yang terkumpul.
- c. Membuat analisis terhadap data atau dokumen-dokumen yang telah diseleksi kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fikih muamalah.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam peneliti.